

HAKIM PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama
Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh:
NURUZZAMAN MS
NIM: R100110022

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014

NOTA PEMBIMBING

Prof.Dr. Absori, S.H, M.Hum
Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Nuruzzaman MS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

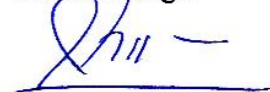
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama	: Nuruzzaman MS
NIM	: R.100110022
Dosen Pembimbing	: Prof.Dr. Absori, S.H., M.Hum
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	: Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta,
Pembimbing I



Prof.Dr. Absori, S.H., M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Dr. M. Muinudinillah Basri., M.A.
Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Nuruzzaman MS

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara :

Nama : Nuruzzaman MS
NIM : R. 100110022
Dosen Pembimbing : Dr. M. Muinudinillah Basri., M.A.
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama).

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta,
Pembimbing II


Dr. M. Muinudinillah Basri., M.A.

TESIS BERJUDUL
HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana
Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

NURUZZAMAN MS

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 16 Desember 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji Lain



Dr. Nurhadiantomo

Pembimbing Pendamping I



Dr. M. Muinudinillah Basri, M.A

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 14 Januari 2015



Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Pascasarjana
Direktur,


Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

PERNYATAAN

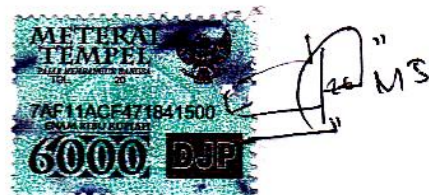
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuruzzaman MS
NIM : R.100 110 022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta, 09 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,



Nuruzzaman MS

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun”.

(Q.S. An Nahl : 78)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”.

(Q. S. Alam Nasyrat: 6)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(Q. S. Alam Nasyrat: 7)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا فَيَرْفَعِ

اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S. Al Mujaadillah : 11)

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : *Pertama*, adanya nash (Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. *Kedua*, Dialektika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra mengenai kedudukan hakim perempuan. *Ketiga*, adanya nash Alquran (QS. 4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkannya.

Dari berbagai pandangan para ulama, tentunya akan memunculkan sebuah dialektika pada pandangan para ulama di Indonesia. Misalnya dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), ORMAS Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang menjadi spectrum berbagai ORMAS lebih mengedepankan kontekstualitas dan tidak berlaku pada pemahaman harfiah. Disini kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

Menanggapi adanya perbedaan pendapat diatas, maka penulis ingin memberikan judul HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut; 1). Bagaimana Posisi Jabatan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? 2). Bagaimana konsep kedepan tentang hakim perempuan yang ditawarkan dalam memutuskan kasus pidana? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sosio historis*, serta berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath hukum* yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta mensistensikan dalil yang akan dipakai oleh MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwa *istinbath hukum* yang dilakukan ketiga lembaga tersebut didasarkan pada konstektualitas dan tidak berlaku pada pemahaman *harfiah*. Dalam konteks ini, kondisi wanita pada waktu itu (pada masa Rasulullah) belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

Kata Kunci: *Hakim Perempuan, Istimbath Hukum, Pendapat Para Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.*

Abstract

Leadership of women in islam is still a controversial issue. This is due to several factors, among others: *first*, the existence of texts (Qur'an and Hadist) which textually implies virtue for men to be leaders. *Secondly*, dialectics is happening in the community, both the pros and cons of the position of woman judges. *Third*, the texts of the Qur'an (QS.4:34) which indicates the primacy of men become the leader and prophet Muhammad hadits narrated by Abi Bakrah Companions who outwardly show that a people will not prosper if it is led by a women. Would however, some experts scholars allow it.

From this views of scholars, will bring up a dialectic on the views of the scholars in Indonesia. For example in this context Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama as a spectrum of institutions into various ORMAS emphasizes the contextuality and does not apply to an harfiah understanding. Here the condition of women at the time (at the time of the prophet) has not allowed them to handle public affairs, because of lack of knowledge and experience. While at times it's a lot of women who have knowledge and experience about the affair.

In response to the differences of opinion, the writer wants to give the title JUDGE LEGAL PERSPECTIVE OF WOMEN IN ISLAM (Judge Position of Women in Criminal Cases Decided According to MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama). So in this study can be formulated as the following formulation of the problem; 1). How to Judge Position Position of Women in Criminal Cases Decided by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama? 2). How does the concept of the future of women judges offered in deciding a criminal case? The method used in this study is a socio-historical method, and seeks to reconstruct istidlal or legal istinbath used MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama systematically and objectively by collecting data and evaluating and mensistensikan proposition that will be used by the MUI, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, in order to obtain a final conclusion in the context of the discourse ness.

Based on the results of a study of MUI, Muhammadiyah and NU can be concluded that the law *made istimbath* three institutions based on *konstektualitas* that does't apply to the literal understanding. In this context, the condition of women in itun time (at the time of the prophet) did't allow them to handle public affairs, due to lack of knowledge and experience, while today has a lot of women who have knowledge and experience on these matters.

Keywords: *Female Judge, Law of Istimbath, the Opinions of the Ulama, Muhammadiyah and Nahdltul Ulama.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis yang berjudul “Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)“, ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Prof. Dr. H. Khuzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan.
3. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan program Magister Pascasarjana.
4. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan sehingga memperlancar penyusunan tesis ini.
5. Dr. M. Muinudinillah Basri., M.A., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan sehingga memperlancar penyusunan tesis ini.

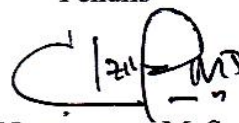
6. Bapak-bapak Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Ketua beserta staf organisasi MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang telah memberikan dorongan, semangat dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Orangtua, kakak dan adik-adikku tercinta beserta calon isteriku yang selalu menanti selesainya tesisku yang menjadi inspirasi dan semangat dalam serta doa selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan kecuali doa yang tulus sebagai tanda terima kasih, semoga amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT.

Apabila dalam hasil penulisan tesis ada hal-hal yang tidak berkenan bagi pihak-pihak yang bersangkutan merasa tersinggung maka sudilah kiranya memberikan maaf kepada penulis serta saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Harapan penulis semoga tesis ini manfaatnya bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 09 Januari 2015

Penulis



Nuruzzaman M. S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN THESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	13
C. Posisioning.....	13
D. Tujuandan Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. SistematikaPenelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. PengertianUmum	
1. Pengertian Hakim	18
2. Pengertian Otoritas Hakim	19
3. Pengertian Perempuan	26
1.1. Pengertian Umum.....	26
1.2. Prespektif Gender	27
4. Pengertian Hukum Islam (Syari'ah)	32
5. Kedudukan Saksi	34
B. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman	36
C. Sejarah Kekuasaan Kehakiman	48
D. Tatacara Pengangkatan Hakim Dalam Islam.....	50
BAB III : DESKRIPSIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. (Kewenangan Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana menurut <i>Istmbat</i> Hukum (Keputusan Hukum) ; MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)	
1. Pandangan Ulama Indonesia.....	54
2. Pandangan Muhammadiyah	62
3. Pandangan Nahdlatul Ulama	71
B. Konsep Ke Depan Tentang Hakim Perempuan Yang Ditawarkan Dalam Memutuskan Kasus Pidana	83
• Skema Tawaran Konsep tentang Hakim Perempuan....	84
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA